

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **4.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sifat mendistribusikan kekuasaan yg didasari oleh interaksi pemerintah wilayah & sentra yg dikaitkan menggunakan sistem sentralisasi & sistem desentralisasi. Indonesia menjadi negara yang menganut sistem desentralisasi, tidak bermaksud desentralisasi ini buat memutuskan interaksi antara pemerintah sentra & wilayah, melainkan desentralisasi memungkinkan kerjasama antara setiap unit pemerintah. Kontrol pemerintah merupakan undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai pemerintah wilayah. Menurut Laksono dan Topatimasang, desentralisasi merupakan proses dimana pemerintah sentra mengalihkan kekuasaan pada pemerintah wilayah pada bentuk hak politik, keuangan & administratif.

Kendali pemerintah memiliki beberapa masalah pemerintahan, salah satunya adalah pariwisata yang merupakan masalah simultan dan terbagi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada masa kepresidenan Joko Widodo, pariwisata menjadi salah satu bidang prioritas di samping perkapalan, makanan, industri, dan energi. Pariwisata juga sering dianggap sebagai kontributor termudah dan termurah, PDB, dan lapangan kerja.

Kemunduran industri pariwisata Indonesia sebelumnya pembangunan dan pengembangan pariwisata hanya fokus pada wilayah Jawa-Bali, sehingga pengembangan pariwisata tidak menyeluruh, dan kelemahan rencana pariwisata Indonesia adalah pariwisata asing yang hanya mengandalkan satu tamu, satu gerbang di Bali. Mengandalkan pintu gerbang turis asing saja, tidak heran jika turis asing jarang bepergian dan perkembangannya tidak

normal. Tidak hanya itu, industri pariwisata dalam masa stagnasi dari tahun 2013 hingga 2015 atau selalu menjadi penyumbang devisa keempat, dari pernyataan atas, sangat penting untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata Indonesia.

Sekretariat Deputi Pengembangan Destinasi serta Industri Pariwisata, Departemen Pariwisata mengatakan bahwasanya "Pariwisata itu parameternya merupakan turis mancanegara". Dengan hal ini, kepariwisataan tidak akan berjalan bila tidak terdapat orang yang melaksanakan ekspedisi keluar dari area tempat tinggalnya serta mendatangi tempat lain. Hendaknya pemerintah pusat serta wilayah wajib mendesak serta menunjang kebijakan jangka panjang berbentuk jalan utama yang lain untuk destinasi prioritas pariwisata Indonesia agar berjalan lebih efektif lagi.

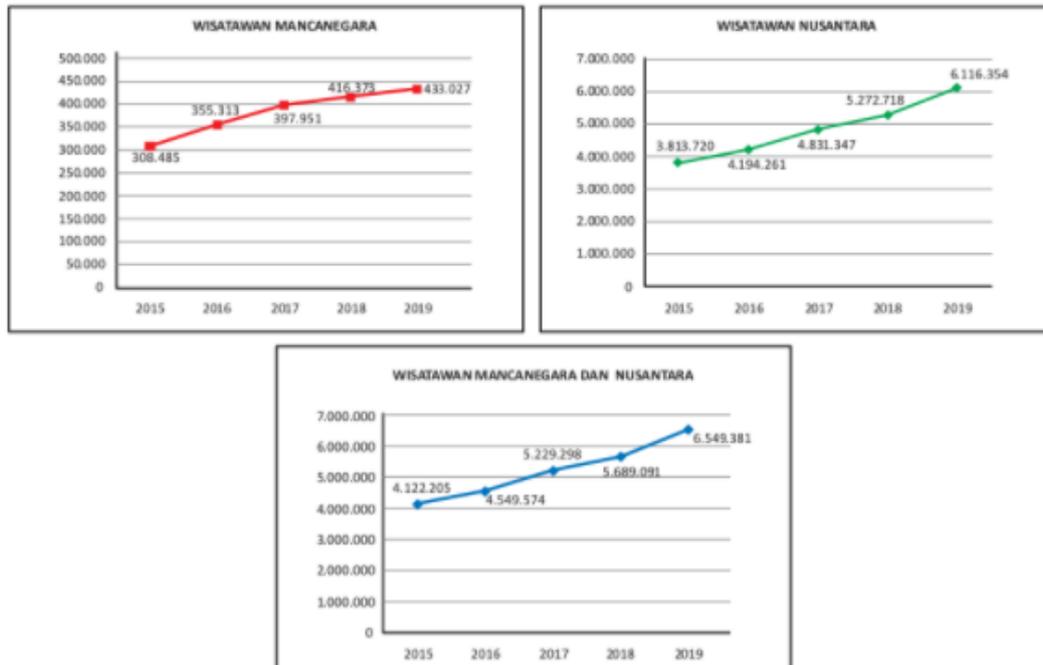
Tujuan pengembangan pariwisata bukan sekedar semata-mata kenaikan perolehan devisa untuk negeri, tapi lebih jauh diharapkan pariwisata bisa berfungsi selaku katalisator pembangunan atau agent of development. Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya terdapat 8 keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia. Pertama adalah kenaikan peluang berupaya/berusaha. Kedua, peluang kerja. Ketiga, kenaikan penerimaan pajak. Keempat, kenaikan pemasukan nasional. Kelima, percepatan proses pemerataan pemasukan. Keenam, tingkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Ketujuh, memperluas pasar produk dalam negara. Serta kedelapan, membagikan akibat multiplier effect dalam perekonomian selaku akibat pengeluaran turis/wisatawan, para investor, ataupun perdagangan luar negara (Yoeti, 2008).

Begitu banyak keuntungan yang bakal bisa diraih, makadari itu pengembangan pariwisata selaku sesuatu industri tidak bisa dilaksanakan selaku pekerjaan sambilan/sampingan, tapi sebaiknya diperlakukan selaku sesuatu bisnis yang wajib dikelola

dengan memakai prinsip- prinsip ekonomi, hukum permintaan serta penawaran, dan strategi perdagangan yang wajib dikelola secara professional (Yoeti, 2008).

Pariwisata ialah salah satu bidang yang saat ini menjadi sebuah prioritas dari pemerintahan dikala ini. Pada tahun 2017, devisa yang didapatkan dari bidang ini merupakan

I.2. Grafik Perkembangan Wisatawan ke DIY Tahun 2015 - 2019

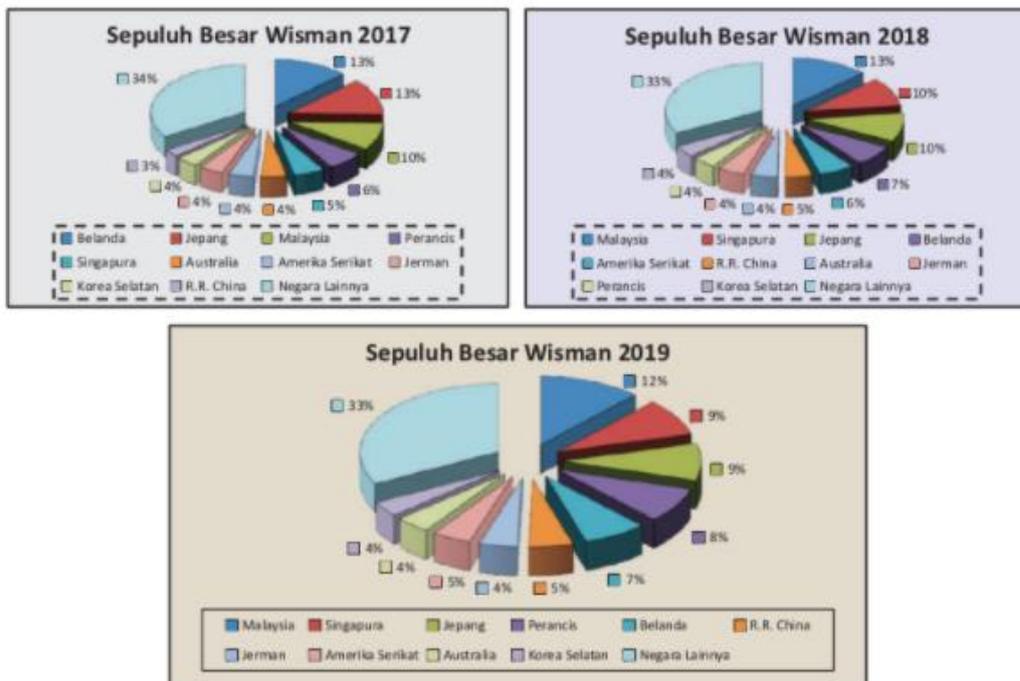


yang terbesar ke 4 sehabis Batu Bara, Migas, serta CPO. Perihal tersebut

bukan suatu hal yang mengejutkan, karena Indonesia mempunyai destinasi prioritas pariwisata yang banyak sekali, bahkan mencapai ribuan. Jenisnya juga sangat bermacam- macam cocok dengan kekayaan budaya, alam, serta sejarah di Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Pemerintah saat ini menargetkan Pariwisata selaku penyumbang devisa terbanyak pada 2019. Guna melengkapi sasaran tersebut, pemerintah saat ini meningkatkan 10 kawasan prioritas pariwisata, ialah, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Morotai, Mandalika, Borobudur, , Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Danau Toba, Labuan Bajo, serta Wakatobi. Kemudian ditambah lagi dengan 10 destinasi yang sudah tumbuh, semacam Raja Ampat, Semarang, Bunaken, Wakatobi, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Kepulauan Riau, Solo, Bandung, serta Yogyakarta. (Rappler, 2017).

Gambar 1.1 : Diagram Perkembangan Peringkat Sepuluh Besar Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2017 – 2019 menurut statistik pariwisata dalam website aplikasi visitingjogja.com.

**I.3. Diagram Perkembangan Peringkat Sepuluh Besar Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2017-2019**



Gambar 1.2 : Grafik Perkembangan Wisatawan ke DIY Tahun 2015 – 2019 menurut statistik pariwisata dalam website aplikasi visitingjogja.com

Grafik diatas adalah sebuah bukti bahwa Yogyakarta mempunyai destinasi pariwisata yang tinggi atensi atau minat dari pengunjung atau wisatawan. Dengan melihat grafik diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya Yogyakarta adalah salah satu kota dengan destinasi prioritas

pariwisata yang besar, bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun grafiknya selalu naik, mulai dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

DIY memiliki banyak potensi wisata yang kuat di bidang budaya dan dikenal di dunia seperti Geopark, Candi Prambanan, Candi Borobudur, hingga wisata bahari. Pemerintah kota DIY juga saat ini sedang menggenjot kawasan prioritas pariwisata untuk dikembangkan. Sebagai percepatan pembangunan kepariwisataan, Pemda DIY menetapkan kawasan prioritas objek wisata yang akan dikembangkan untuk wisatawan mancanegara dan Nusantara. DIY menetapkan 9 kawasan prioritas pariwisata yakni penataan kawasan Keraton Yogyakarta, kawasan Sumbu Filosofi, kawasan Perbukitan Menoreh, kawasan Pantai Samas-Parangtritis, dan kawasan Pantai Selatan DIY. Selain itu ada juga penataan kawasan Perkotaan Yogyakarta, kawasan Puro Pakualaman, kawasan Bandara Baru Kulon Progo serta kawasan Pantai Selatan Kulon Progo. Sembilan titik kawasan prioritas itu, sudah dituangkan dalam surat keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Contoh pelaksanaan program yang terus digenjot dalam penataan kawasan yakni seperti penataan di kawasan benteng Keraton Yogya.

Herayanthi (2020) mengatakan bahwa dalam dunia kepariwisataan, kepuasan dari wisatawan yang berkunjung ke sebuah destinasi merupakan kondisi untuk menjaga keberlanjutan destinasi itu sendiri. Wisatawan yang merasa puas menggunakan pengalaman berwisatanya akan memiliki pemikiran untuk berkunjung kembali ke destinasi prioritas pariwisata tersebut. Rozak dan Basiya melakukan sebuah penelitian yang mempunyai tujuan guna menganalisis faktor-faktor daya tarik objek wisata sesuai persepsi wisatawan dan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan dan niat berwisata kembali ke destinasi prioritas pariwisata tersebut. Selain itu wisata buatan, wisata alam, budaya serta sosial terbukti menyampaikan pengaruh positif terhadap niat untuk berwisata lagi (Basiya & Rosak, 2012).

Menurut peneliti, pentingnya kolaborasi stakeholder atas keikutsertaannya mengembangkan pariwisata Yogyakarta adalah karena Yogyakarta sebagai salah satu pusat pariwisata besar di Indonesia pastinya memiliki problem atau permasalahan yang tak dapat dituntaskan oleh salah satu pihak saja, daripada itu ketiga pilar yakni Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat harus bekerjasama mengembangkan serta mencari solusi setiap permasalahan yang ada untuk pariwisata Yogyakarta yang lebih baik. Apabila tidak ada Kerjasama antara ketiga pilar, hal ini tentunya akan menghambat perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, sehingga sinergi dan peran positif dari seluruh stakeholders yang ada yaitu pemerintah kota, pemerintah dan swasta khususnya sebagai pelaksana dan subyek untuk mengatasi kota Yogyakarta. Lagipula, solusi untuk masalah kompleks seperti itu tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah tidak berjalan sendiri karena kapasitasnya tidak memenuhi sehingga harus ada pihak swasta dan masyarakat yang berperan untuk membantu meningkatkan performa dalam pengembangan kawasan prioritas pariwisata.

Alasan peneliti memilih Kota Yogya sebagai focus penelitian adalah karena Yogyakarta adalah salah satu kota yang mempunyai atensi kuat mengenai pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri mempunyai energi tarik wisata yang bermacam-macam guna menarik atensi para turis baik nusantara ataupun internasional. Istilah Yogyakarta selaku wilayah pariwisata menggambarkan kemampuan provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Berbagai tipe obyek wisata yang dibesarkan di daerah ini semacam wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, serta wisata pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses collaborative governance dalam pengembangan kawasan prioritas pariwisata di Kota Yogyakarta. Selain itu, juga ingin diketahui faktor-faktor apa saja yang berperan penting dalam pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan kawasan prioritas pariwisata di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang dijelaskan dalam pendahuluan diatas menarik untuk dilakukan

penelitian sehingga penulis mengambil judul “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021”.

## 4.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan oleh penulis maka dapat ditarik satu rumusan masalah yakni:

- a) Bagaimana proses Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021?

## 4.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan implementasi Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021

## 4.4 Manfaat Penelitian

### 4.4.1 Teoritis

- Penelitian ini secara teori disemogakan dapat menjadi sebuah sokongan dalam pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang proses Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021.
- Referensi pengembangan konsep *collaborative governance*
- Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang

### 4.4.2 Praktis

- Pemerintah Pusat  
Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah masukan bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan perannya dalam mengembangkan kawasan prioritas pariwisata Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah

Sebagai sarana bahan pertimbangan untuk badan pemerintah daerah yang akan mengembangkan dan meningkatkan kawasan prioritas pariwisata di daerahnya.

- Swasta

Sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan prioritas pariwisata kota Yogyakarta.

- Masyarakat

Sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak masyarakat yang ikut bernaung dibawah dunia Pariwisata untuk ikut mengembangkan kawasan prioritas pariwisata kota Yogyakarta.

#### 4.5 Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
-----	--------------	------------------	------------------

1.	(Rintan Mirza Diani & Yoanes Kevin Gratianus Simbolon, 2017)	Analisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan wisata bencana Lava Tour.	Hasil penelitian menunjukkan Keterlibatan sector swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut merupakan aplikasi dari collaborative governance. Bentuk kolaborasi yang dilakukan ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah dengan menggunakan model shared vision dan partisipasi, dimana upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi di bidang tata kelola pariwisata. Hubungan yang terjalin ketiga pilar tersebut adalah kolaborasi. Dengan melakukan kolaborasi maka akan terlihat bagaimana kejelasan peran dari masing-masing stakeholders, penggabungan sumberdaya yang ada, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang.
2.	(Niken Nurmiyati, Iman Surya, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, 2021)	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Kulonprogo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo)	hasil riset membuktikan Penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan wisata berkepanjangan di kabupaten kulon progo berkata kalau keterlibatan bermacam pihak serta identifikasi pembangunan Kawasan pariwisata mempunyai kemampuan buat memajukan dengan mengkolaborasi sumber energi yang dipunyai bermacam pihak serta kerja sama diawali oleh Pemerintah Pusat,

			<p>Pemerintah Provinsi, Pemerintah Wilayah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah Desa. Pengelolaan pariwisata berkepanjangan dengan sanggup berdaya saing dengan mempertahankan kearifan lokal.</p>
3.	<p>(Matthoriq, Soesilo Zauhar, Romy Hermawan, 2021)</p>	<p>Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu</p>	<p>Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan di masa governance pada era ini sangat membutuhkan komitmen pemerintah agar tidak memilah berkompetisi dengan swasta ataupun faktor NGO( Non Government Organization) yang lain melainkan memilah upaya kerja sama dengan tingkatkan kerjasama antar stakeholder pariwisata. Bersumber pada perspektif inilah, pengelolaan pariwisata terwujud strategis dalam riset public administration, khususnya dalam konteks governance. Sebagaimana yang ditegaskan bahwasanya governance selaku suatu konsep dan teori dalam pertumbuhan ilmu administrasi publik menekankan pada prinsip kerjasama dalam penerapan urusan serta pelayanan pemerintah yang dibesarkan oleh sebagian ahli dengan persyaratan collaborative governance serta partnership governance.</p>

4.	(Nadia F. Tongkotow, Welly Waworundeng, Alfon Kimbal, 2021)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok	menyatakan bahwa Pemerintah tidak cuma mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam pelaksanaan suatu kebijakan serta pelaksanaan program. Keterbatasan keahlian, sumberdaya ataupun jaringan yang menjadikan aspek pendukung terlaksananya sesuatu program ataupun kebijakan, mendesak pemerintah guna melaksanakan kerjasama dengan bermacam pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta ataupun warga serta komunitas masyarakat sipil sehingga bisa terjalin kerjasama kolaboratif dalam menggapai tujuan program ataupun kebijakan.
5.	(Kedasi Silayar, Ika Sartika, Deti Mulyati, 2021)	Kolaboratif Government dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula	Menjelaskan bahwasanya Collaborative Governance adalah kegiatan yang melibatkan aktor di mana terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama-sama. Aktor - Aktor mendorong dengan faktor berbeda, 4 di antaranya adalah motifnya. Setidaknya ada faktor pendorong dalam pemerintahan kolaboratif 4 hal itu juga yaitu kepemimpinan, hasil insentif prestasi, saling ketergantungan antar aktor, dan ketidakpastian
6.	(Achmad Chodiq, Mahardhika Berliandaldo,	Kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata Kebun Raya Cibinong	Pernyataan bahwa pemerintah harus selalu mendengarkan suara rakyat untuk menentukan

	Driszal Fryantoni, 2021)		kebijakan dan strategi apa yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, perlu melibatkan warga negara dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, kesediaan untuk melibatkan masyarakat secara konstruktif melintasi batas-batas wilayah publik, privat, dan sipil di tingkat kelembagaan publik, pemerintahan, dan/atau publik, privat, dan sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai. proses dan struktur.
7.	(Hendro Pratikno & Anwar Kurniadi, 2021)	Kolaboratif Pengelolaan Candi Borobudur Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi	Menyatakan dalam penelitiannya bahwa Membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol diawal proses kolaboratif tetapi sangat sulit diciptakan. Dalam proses kolaborasi tidak hanya mementingkan kepercayaan antara pemegang peran, tetapi merupakan titik awal yang umum untuk pemerintahan kolaboratif. Membangun kepercayaan merupakan aspek yang tidak terlepas dari tatap muka dan konflik masa lalu, kedua hal tersebut sangat mempengaruhi dalam membangun kepercayaan agar proses kolaboratif dapat berjalan dengan baik
8.	(Zaenuri, 2018)	Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance	Dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk mengembangkan kepariwisataan, diperlukan adanya sebuah

			<p>konsep pemerintahan yang lebih progresif dan akseleratif. Konsep governance yang lebih akseleratif ini bisa dalam bentuk kolaboratif governance, hal ini dikarenakan melibatkan bentuk kerjasama antara insitusi pemerintah, swasta dan masyarakat bukan hanya memiliki tujuan atau kepedulian yang sama pada suatu permasalahan/isu tertentu, tetapi keduanya juga saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggungjawab, dan manfaat.</p>
9.	(Mochamad Rozikin, Rendra Eko Wismanu & Andhyka Muttaqin, 2019)	Model Collaborative Governance Dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism	<p>Dalam penelitiannya berkata kalau Wujud serta tipe kemampuan wisata yang beranekaragam bisa dibesarkan serta dikelola dengan baik, lewat kerja sama ataupun kerjasama oleh seluruh pihak ataupun dengan kata lain lewat Collaborative Governance. Kerja sama yang dicoba oleh pemerintah pusat, pemerintah wilayah, warga, komunitas, pelakon swasta, pihak akademis, Non Governmental Organization( NGO) serta lain sebagainya, ialah kekuatan dalam meningkatkan kemampuan pariwisata yang terdapat.</p>
10.	(Putra D. A., 2017)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul (Studi Kasus Bumidesa Maju Mandiri Dan Kelompok Sadar Wisata	<p>Pengelolaan obyek wisata melibatkan berbagai bidang seperti keuangan, pelatihan, pemasaran, pembinaan, dan lain-lain, sehingga menetapkan</p>

		Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 2017-2018)	bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja dan diupayakan oleh banyak pihak dengan kewenangan masing-masing. Adanya tata kelola kolaboratif ini merupakan salah satu cara untuk saling bekerjasama, termasuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen, komunikasi, keterlibatan Kongres Rakyat, negosiasi, regulasi, implementasi program dan strategi.
--	--	---	---

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih fokus pada konsep collaborative governance dalam pengembangan kawasan prioritas pariwisata kota Yogyakarta. Adanya perbedaan teori, topik pembahasan serta metode dari penelitian ini juga yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya.

## 4.6 Kerangka Teori Dasar

### 4.6.1 Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. pada suatu pemerintahan, kebijakan merupakan suatu hal yang krusial, hal ini sebab kebijakan dapat menyampaikan dampak yang baik bagi kehidupan

masyarakat negara Indonesia. oleh sebab itu pada suatu pemerintahan kebijakan harus bisa berjalan dengan sebaik - baiknya. Bila kebijakan pemerintah dapat berjalan sinkron dengan harapan sebelumnya, maka kehidupan rakyat yang sejahtera pun akan terjamin. Pada sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan - badan tersebut melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus bisa dilakukan dengan baik dan juga benar supaya hal tersebut tak merugikan pemerintahan.

#### **4.6.2 Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata**

Tercantum dalam UU Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Wilayah tujuan pariwisata yang berikutnya diucap Destinasi Pariwisata merupakan kawasan geografis yang terletak dalam satu ataupun lebih daerah administratif yang didalamnya ada energi tarik wisata, sarana universal, sarana pariwisata, aksesibilitas, dan warga yang silih terpaut serta memenuhi terwujudnya kepariwisataan. Definisi pariwisata untuk Yoeti (1996) ialah suatu ekspedisi yang di jalani buat sedangkan waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan buat berupaya maupun mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi hanya menikmati ekspedisi/ ekspedisi hidup guna melancong dan tamasya maupun memenuhi keinginan yang beranekaragam. Robert Mc. Intosh bersama Shashiakant Gupta melaporkan bahwasanya pariwisata ialah gabungan gejala dan jalinan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan- turis ini serta para turis yang lain (Pendit, 1999).

Alibi utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu wilayah tujuan wisata, baik secara local, regional maupun ruang lingkup nasional sangat erat kaitannya

dengan pembangunan perekonomian daerah maupun negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah destinasi prioritas pariwisata hendak tetap diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat buat warga. Sehingga dapat dikatakan kalau Pengembangan pariwisata yakni suatu rangkaian upaya yang diimplementasikan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam konsumsi berbagai sumber tenaga pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yakni memajukan, memperbaiki, dan tingkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan energi tarik wisata sehingga sanggup jadi tumbuh serta ramai buat dikunjungi oleh wisatawan/ turis serta mampu memberikan suatu manfaat/ khasiat baik buat masyarakat di dekat obyek dan energi tarik dan lebih lanjut hendak jadi sumber pemasukan buat pemerintah.

(Hadinoto) menyatakan terdapat sebagian perihal yang memastikan dalam pengembangan sesuatu obyek wisata antara lain merupakan:

1. Atraksi Wisata

Atraksi ialah energi tarik turis buat liburan. Atraksi yang diidentifikasi (sumber energi alam, sumber energi manusia, budaya, serta sebagainya) butuh dibesarkan buat jadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak terdapat peristiwa, bagian utama lain tidak hendak dibutuhkan.

2. Promosi serta Pemasaran

Promosi ialah sesuatu rancangan buat menghadirkan atraksi wisata yang ditawarkan serta metode gimana atraksi bisa didatangi. Buat perencanaan, promosi ialah bagian berarti.

3. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata ialah bagian berarti. Meski buat perencanaan belum/ tidak dibutuhkan sesuatu studi lengkap serta mendalam, tetapi data menimpa trend pelakon, kemauan, kebutuhan, asal, motivasi, serta sebagainya serta turis butuh dikumpulkan dari mereka yang liburan.

#### 4. Transportasi

Pemasukan serta kemauan turis merupakan berbeda dengan komentar penyuplai transportasi. Transportasi memiliki akibat besar terhadap volume serta posisi pengembangan pariwisata.

#### 5. Masyarakat

Penerima Turis yang Sediakan Akomodasi serta Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (sarana serta pelayanan).

Adapun perencanaan pengembangan pariwisata menurut Sastrayuda (2010) yakni meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana segala faktor yang terlibat dalam perencanaan serta pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis ataupun instan/praktis.
2. Pendekatan kemampuan serta ciri ketersediaan produk budaya yang bisa menunjang keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan warga, merupakan membagikan peluang kepada warga guna meningkatkan kemampuannya supaya tercapai keahlian baik yang bertabiat/bersifat individu ataupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, aspek keterkaitan antar daerah ialah aktivitas penting yang bisa membagikan potensinya selaku bagian yang wajib dipunyai serta diseimbangkan secara berencana.

5. Pendekatan optimalisasi kemampuan, dalam optimalisasi kemampuan yang terdapat di sesuatu desa semacam pertumbuhan kemampuan kebudayaan masih tidak sering dijamah ataupun digunakan selaku bagian dari penanda/indikator keberhasilan pengembangan.

Adapun beberapa jenis pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke (1996), yakni:

- Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di tempat/situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
- Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
- Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
- Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
- Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Menurut Pendit (1994), terdapat beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, seperti:

1. Wisata budaya, ialah ekspedisi yang dilaksanakan atas dasar kemauan guna memperluas pemikiran hidup seorang dengan metode mengadakan kunjungan ke tempat lain ataupun ke luar negara, menekuni kondisi

rakyat, kerutinan serta adat istiadat mereka, metode hidup mereka, kebudayaan serta seni mereka.

2. Wisata kesehatan, ialah ekspedisi seorang turis dengan tujuan buat mengubah kondisi serta area tempat tiap hari di mana dia tinggal demi kepentingan istirahat menurutnya dalam makna jasmani serta rohani.
3. Wisata berolahraga, ialah wisatawan- wisatawan yang melaksanakan ekspedisi dengan tujuan olahraga ataupun memanglah terencana bermaksud mengambil bagian aktif dalam acara berolahraga di sesuatu tempat ataupun Negeri.
4. Wisata komersial, ialah tercantum ekspedisi buat mendatangi pameran - pameran yang bertabiat komersial, semacam pameran industri, pameran dagang serta sebagainya.
5. Wisata industri, ialah ekspedisi yang dicoba oleh rombongan pelajar ataupun mahasiswa, ataupun orang- orang awam ke sesuatu lingkungan ataupun wilayah perindustrian, dengan iktikad serta tujuan buat mengadakan peninjauan ataupun riset.
6. Wisata Bahari, ialah wisata yang banyak berhubungan dengan danau, tepi laut ataupun laut.
7. Wisata Cagar Alam, ialah tipe wisata yang umumnya diselenggarakan oleh agen ataupun biro ekspedisi yang mengkhususkan usaha- usaha dengan mengendalikan wisata ke tempat ataupun wilayah cagar alam, halaman lindung, hutan wilayah pegunungan serta sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang- undang.

8. Wisata bulan madu, ialah sesuatu penyelenggaraan ekspedisi untuk pasangan pasangan pengantin baru yang lagi berbulan madu dengan fasilitas- fasilitas spesial serta tertentu demi kenikmatan perjalanan.

Jackson dalam Gde Pitana (2005) menyatakan bahwasanya ada hal penting yang mempengaruhi suatu daerah yang berkembang menjadi sebuah destinasi pariwisata, seperti:

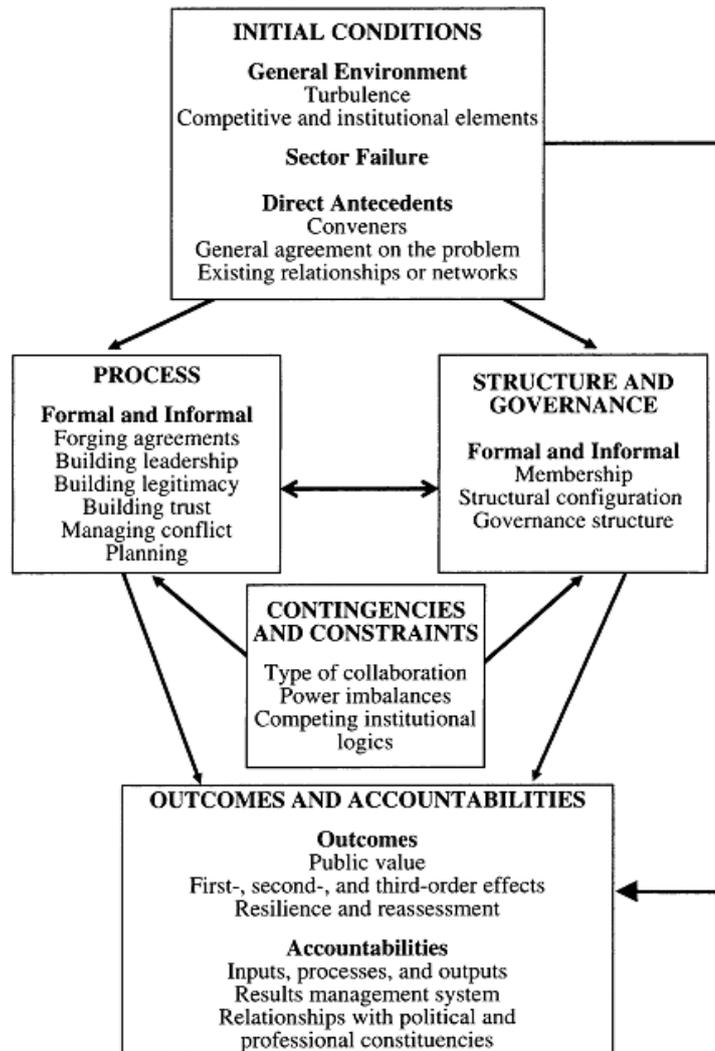
- Menarik untuk klien/pengunjung.
- Fasilitas-fasilitas dan atraksi.
- Lokasi geografis.
- Jalur transportasi.
- Stabilitas politik.
- Lingkungan yang sehat.
- Tidak ada larangan/batasan pemerintah.

#### **4.6.3 Collaborative Governance**

Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Bryson, Crosby, & Stone (2006) mendefinisikan kerjasama selaku proses sharing resources, data, kegiatan serta kapabilitas yang dicoba oleh bermacam organisasi di dalam satu ataupun sebagian zona guna memperoleh hasil yang di idamkan yang takbisa didapatkan apabila hanya dicoba oleh organisasi-organisasi yang terletak pada satu zona saja. Bryson serta Corby menegaskan bahwasanya pemakaian sebutan cross- sector collaboration guna membuktikan terdapatnya keterlibatan pihak pemerintah, nonprofit, bisnis, komunitas, serta institusi- institusi publik yang lain secara totalitas. Dari ilustrasi sebagian definisi yang dikemukakan tersebut dapatlah diambil sesuatu kesimpulan bahwasanya collaborative governance ialah sesuatu paradigma baru dalam pemerintahan di mana zona bisnis, masyarakat, NGOs, serta stakeholder yang lain dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, penerapan kebijakan, serta tata kelola pemerintahan secara universal. Orientasi dari pelibatan tersebut ialah upaya dalam menuntaskan permasalahan besar yang takmungkin dapat dituntaskan oleh satu pihak saja, tetapi akan membutuhkan kerjasama dari bermacam pihak. Sehingga orientasinya merupakan keberhasilan dari kebijakan tersebut cocok dengan cita- cita serta tujuan bersama. Sekalipun idealnya inisiasi dari kerjasama tersebut haruslah tiba dari pemerintah. Dalam merumuskan ketinggian yang lebih instan, sebagian ilmuan telah merumuskan model bagaimanakah kerangka kerja dari collaborative governance tersebut.

Menurut teori dari Bryson, Crosby, & Stone (2006) dengan istilahnya yakni cross-sector collaboration. Adapun teori tersebut mempunyai beberapa tahapan proses mulai dari initial condition, structure and governance, process, contingencies and constraints, outcomes and accountabilities. Berikut ini tahapan teori tersebut.



Gambar 1.8 Cross-sektor Kolaborasi Model Bryson, Stone, dan Crosby (2006)

Bryson, Crosby, & Stone (2006) mendefinisikan kolaborasi lintas sektor sebagai penghubung atau berbagi dari informasi, sumber daya, aktivitas, dan kemampuan oleh organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk mencapai bersama-sama suatu hasil yang tidak dapat dicapai oleh organisasi dalam satu sektor secara terpisah. Bryson, Crosby, & Stone (2006) juga menyatakan bahwa orang - orang yang ingin mengatasi masalah sosial yang sulit, sudah mulai menyadari bahwa berbagai komponen pembangunan yang bergerak di bidang bisnis, nonprofit, atau filantropi harus saling bersinergi untuk menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang efektif.

Bryson, Crosby, & Stone (2006) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah satu syarat penting untuk membangun sinergi organisasi yang terdeferensiasi. Bryson, Crosby, & Stone (2006) menyatakan bahwa untuk membangun kolaborasi sehingga mencapai kolaborasi tingkat tinggi diperlukan antara lain sistem dan tujuan strategis kolaborasi. proses koordinasi dari kondisi awal proses, struktur dan pemangku kepentingan, kontinjensi dan kendala serta hasil dan akuntabilitas adalah suatu tahapan dalam konsep kolaboratif (Bryson, Crosby, & Stone, 2006). Model penguatan kelembagaan collaborative memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan masyarakat. Model ini mampu memperkuat sistem jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidak sepahaman antar stakeholders. Model ini juga dapat memperjelas peran masing-masing stakeholders serta akuntabilitasnya (Bryson, Crosby, & Stone, 2006).

Penelitian Berardo, Heikkila, and Gerlak (2014); Quick and Feldman (2011). menunjukkan bahwa proses dan struktur bekerjasama erat dalam membina kerjasama lintas sektor yang efektif. Inklusif proses khususnya membantu menjembatani perbedaan di antara para pemangku kepentingan dan membantu mitra membangun struktur inklusif, menciptakan visi pemersatu, dan mengelola ketidakseimbangan kekuatan. Struktur inklusif, pada gilirannya, memfasilitasi tata kelola kolaborasi dan membantu mengimplementasikan kesepakatan mitra.

Dalam literatur kolaborasi, struktur belum menarik tingkat kepentingan yang sama dengan proses, sebagian karena peneliti memiliki menekankan "pengorganisasian" sebagai proses atas "organisasi" (Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012). Namun demikian, para sarjana sekarang mengakui bahwa kolaborasi atau jaringan sering tumpang tindih alih-alih diganti pengaturan hierarki yang ada (Agranoff, 2007), dan dengan demikian perhatian pada komponen struktural telah meningkat.

#### **4.6.4 Kolaborasi Dalam Pariwisata**

Perencanaan pariwisata selaku perencanaan yang multi zona serta multi aspek dan multi daerah, hingga diperlukan perencanaan kolaboratif selaku proses menuju perencanaan yang terintegratif baik secara hirarki( Provinsi, Kabupaten, Kota) ataupun secara zona( bermacam kelembagaan/ kementrian). Perencanaan kolaboratif selaku proses mengarah perencanaan yang terintegratif baik secara hirarki( Provinsi, Kabupaten, Kota) ataupun secara zona( bermacam kelembagaan/ kementrian). Supaya perencanaan kolaboratif (*collaborative planning*) bisa diwujudkan hingga yang wajib dicermati merupakan : ( a) Seluruh pihak yang ikut serta bersedia membuka diri, sehingga timbul“ trust” ataupun saling percaya di antara bermacam pihak yang hendak bekerjasama. Seluruh pihak wajib terbuka, jujur, silih menghormati serta menghargai, sehingga tidak timbul konflik. (b) Pendekatannya wajib kerja sama ataupun bersinergi, bukan berarti tidak terdapat kompetisi, kompetisi boleh terdapat tetapi harus dilindungi selaku usaha buat energi dorong menggapai tujuan bersama. (c) Tiap pihak memposisikan dirinya sama ataupun terdapat kesederajatan jadi tidak terdapat yang besar ataupun rendah, namun berbeda dalam kedudukan, misal : pemerintah selaku mediator, fasilitator serta legislator. Sebaliknya swasta selaku praktisi serta investor.

#### **4.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang menjadi fokus perhatian. Sehingga bertujuan membatasi suatu pengertian yang nantinya akan memudahkan dalam menjalankan penelitian di lapangan. Banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

##### **4.7.1 1.6.1 Collaborative Governance**

Menurut Ansell & Gash (2007) bahwa *Collaborative governance* merupakan suatu pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama dengan

stakeholder yang berkaitan langsung dalam proses pengambilan keputusan secara bersama yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program aset publik. Maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Collaborative governance adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder yang berkaitan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Kemudian stakeholder tersebut bekerjasama dalam mencari solusi suatu permasalahan, sehingga masalah dapat teratasi dengan baik dengan adanya kerjasama yang baik.

#### **4.7.2 Pengembangan Pariwisata**

Barreto dan Giantari (2015) menyatakan bahwa Pengembangan pariwisata merupakan sesuatu usaha guna meningkatkan ataupun memajukan objek wisata supaya objek wisata tersebut lebih baik serta lebih menarik ditinjau dari segi tempat ataupun benda- benda yang terdapat didalamnya guna bisa menarik atensi turis untuk mengunjunginya.

#### **4.8 Definisi Operasional**

Penelitian ini akan menjelaskan dalam beberapa bentuk indikator tentang kolaborasi pemerintah berdasarkan teori-teori diatas, maka hal ini melihat bagaimana peran masing-masing stakeholder beserta proses *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan prioritas pariwisata kota Yogyakarta tahun 2021.

- A. Untuk mengetahui proses kolaborasi ada indikatornya, yaitu:
  - a) Kondisi awal
  - b) Struktur dan tata Kelola
  - c) Proses
  - d) Kontinjensi/kemungkinan dan kendala
  - e) Hasil dan akuntabilitas.

B. Untuk mengetahui proses pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata, ada indikatornya, yaitu:

- a) Atraksi Wisata
- b) Promosi serta Pemasaran
- c) Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)
- d) Transportasi
- e) Masyarakat

## **4.9 Metode Penelitian**

### **4.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Alasan digunakan analisa kualitatif deskriptif adalah karena sesuai dengan judul yang dipaparkan yaitu Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator yang diteliti terkait Kolaborasi.

## **4.10 Data dan Sumber Data**

### **4.10.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Data primer menurut Arikunto (2010) adalah data berbentuk verbal yaitu

kata-kaya yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan narasumber dapat dipercaya, yakni informasi yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang didapatkan dari responden secara langsung (Arikunto, 2010). Data primer ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Pemerintah pusat dan daerah kota Yogyakarta yang terlibat untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengumpulan data. Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data terkait pelaksanaan proses kolaborasi dan tata kelola pengembangan kawasan prioritas pariwisata di kota Yogyakarta di tahun 2021 khususnya di Kawasan destinasi prioritas pariwisata Malioboro.

#### **4.10.2 Data Sekunder**

Menurut Supomo (2014) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan, ataupun laporan historis yang telah disusun dalam data dokumenter yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta studi pustaka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, survey literatur, berita, dan lain sebagainya yang bersifat laporan atau cerita orang lain (Arikunto, 2010). Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data terkait pelaksanaan proses kolaborasi dan tata kelola pengembangan kawasan prioritas pariwisata di kota Yogyakarta tahun 2021 khususnya di Kawasan destinasi prioritas pariwisata Malioboro.

#### **4.11 Unit Analisis**

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka unit analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY,

UPT Malioboro yang ikut mengembangkan Kawasan Prioritas Pariwisata di Kota Yogyakarta.

#### **4.12 Lingkup Penelitian**

Agar setiap masalah yang dibahas dalam penelitian ini mencapai target dan memberikan arah yang jelas, maka peneliti membatasi ruang lingkup yang diteliti, diantaranya : Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, UPT Malioboro.

#### **4.13 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, dimana tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2020). Peneliti akan mencari data collaborative governance dan data pengembangan pariwisata kota Yogyakarta dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **a. Studi Pustaka**

Menurut Sugiyono (2012), studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti dalam studi pustaka membaca dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan collaborative governance tentang Kerjasama di sector pariwisata.

##### **b. Wawancara**

Wawancara menjadi suatu hal yang penting dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi yang akan ditransformasikan dalam bentuk kata-kata (Pranata, 2019). Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang terdiri dari *interviewer* (pewawancara) selaku pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak *interviewee* (terwawancara) sebagai pihak yang memberi tanggapan dari pertanyaan yang dilakukan (Putra, 2018). Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui perkembangan dari program kawasan prioritas pariwisata Yogyakarta. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian :

<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Data yang akan didapatkan</b>
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Bidang Daya Tarik Wisata	Proses Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata dan data proses collaborative governance dalam pengembangan tersebut
Dinas Pariwisata DIY	Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	Proses Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata dan data proses collaborative governance dalam pengembangan tersebut
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Proses Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata dan data proses collaborative governance dalam pengembangan tersebut

c. Observasi

Teknik Observasi menurut Nawawi & Martini (1991) adalah pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui sejauh mana perkembangan program Kawasan Prioritas Pariwisata Yogyakarta. Kesimpulan dari observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna melengkapi penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Observasi yang akan peneliti lakukan adalah mengenai bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2021 serta peneliti akan mencari data collaborative governance dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan suatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data dari dokumen, catatan, file atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan (Djaelani dalam Pranata, 2019). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan program Kawasan Prioritas Pariwisata Yogyakarta. Dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025, serta SK Gubernur DIY No.163/KEP/2017.

### **1.1.1 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menjadikan obyektivitas data sebagai instrumen dengan memberikan kesempatan luas kepada obyek untuk menyampaikan informasi. Analisis data lebih mengarah untuk mengorganisasikan suatu temuan yang kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut kedalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi informasi-informasi penting (Pranata, 2019). Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan terhadap objek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data dalam penelitian yang sedang dilakukan.

#### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat dan digunakan sebagai penentu fokus serta pendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya.

#### 2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan secara tertulis dilapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Pranata, 2019).

#### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah mereduksi data yaitu menyajikan data. Pradita dalam Pranata (2019) mengatakan bahwa membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

**4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)**

Pada langkah ini mengemukakan temuan baru yang belum pernah ada atau menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada dengan cara memilih data yang dapat menjawab permasalahan yang ada agar didapatkan kesimpulan yang valid.